

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2016 - 2021**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah serta bimbingan-Nya maka Rencana dan Strategi (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan dan disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematika penyusunan RENSTRA OPD.

Penyusunan RENSTRA ini adalah suatu keharusan bagi setiap OPD dan telah disesuaikan berdasarkan kondisi, permasalahan dan kebutuhan daerah sesuai dengan Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Demikian juga untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016 -2021

Atas kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait dalam penyusunan Rencana dan Strategi (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok ini, diucapkan terima kasih.

Demikianlah sebagai pengantar dari Kami, semoga dapat dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan.



ZULFAHMI, SH. MM

Pembina Tk.I/ IV.b

NIP. 19660325 199402 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DPPKBP3A KABUPATEN SOLOK	13
2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Dan Struktur	13
2.2. Sumber Daya Manusia / Kepegawaian	28
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	31
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	40
BAB III. GAMBARAN PELAYANAN DPPKBP3A KABUPATEN SOLOK	44
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD	44
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	51
3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga (K/L)	54
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	56
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DPPKBP3A TAHUN 2016 – 2021	58
4.1. Visi Dan Misi DPPKBP3A	58
4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DPPKBP3A	60
4.3. Strategi Dan Kebijakan DPPKBP3A	61
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	67
5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	67
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	72
BAB VI. PENUTUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini berisi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra DPPKBP3A Kabupaten Solok yang memiliki nilai strategis dan penting, anatar lain :

1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat daerah (OPD).
3. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen pengendalian bagi satuan Pengawas Internal (SPI) Organisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis

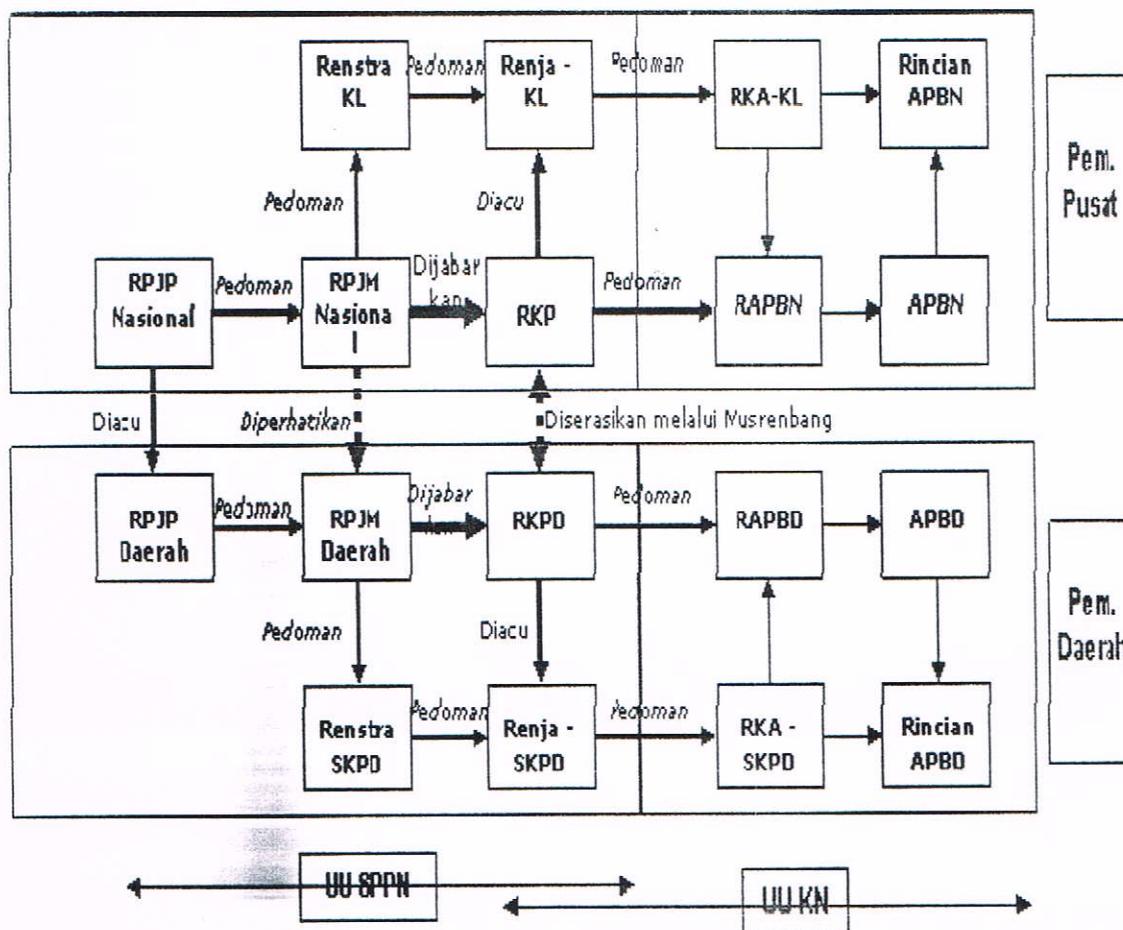
operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 4 tahun 2016.

Renstra OPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, dan dengan Renja OPD diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra OPD mengacu pada tugas dan fungsi OPD sesuai dengan Peraturan Daerah tentang OPD Kabupaten Solok, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Solok tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (OPD), RPJMD Kabupaten Solok, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/KabupatenSolok, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten Solok.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang di tuangkan melalui program dan kegiatan serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan



1. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD
Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap OPD dibawah koordinasi Barenlitbang Kabupaten Solok. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD
2. Keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L
Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.
3. Keterkaitan Renstra OPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota

Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra OPD juga harus disertai dengan telaah Renstra propinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

DPPKBP3A Kabupaten SolokDinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok. Ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam melaksanakanProgram Diinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok.

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021, Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan yang disusun dan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra hanya merupakan indikasi hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.Renstra ini juga sebagai acuan implementatif bagi seluruh pegawai Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
18. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
30. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 36. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 37. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
 40. Peraturan Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor &);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penanggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
46. Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Renstra Dinas PPKB Dan P3A memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas PPKB dan P3A menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PPKB dan P3A yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas PPKB dan P3A menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas PPKB dan P3A, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas PPKB dan P3A.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4.Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab IIGambaran Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Dinas Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab VI Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KEUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SOLOK

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas PPKB P3A Kab. Solok

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok yang secara umum mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Solok mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Kkeluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas PPKB dan P3A; dan
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Solok, maka Sususan Struktur Organisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok terdiri dari Kepala, Sekretariat dan 3 Bidang yang masing-masingnya dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, 2 Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dan 9 Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi

dengan uraian sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, data dan Informasi terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan
 3. Seksi Informasi dan Data
- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
 1. Seksi Jaminan Pelayanan ber-KB
 2. Seksi Kesertaan ber-KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 3. Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 1. Seksi Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak
 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak
 3. Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus

Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan IV Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas PPKB dan P3A yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program dan Anggaran meliputi Penyusunan Renstra, Renja dan RKA.
- b. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Yang Meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Rumah Tangga, Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Penyelenggaraan Urusan Keuangan dan Kelengkapan yang meliputi

Perbendaharaan, Pendapatan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, Monitoring dan Pelaporan.

Sekretariat Terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoma kepada Renstra;
- d. Mengusulkan pejabat pengelola keuangan;
- e. Menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/ jasa dan pengelolaan barang milik daerah;
- f. Mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan;
- g. Melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran;
- h. Menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- i. Mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezzetting Pegawai, formasi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami dan kartu TASPEN, tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural dan fungsional;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
- k. Menyiapkan dan menyampaikan bahan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punishment);
- l. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan,

kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Menyiapkan data statistik;
- e. Menghimpun, mengkoordinasikan dan menyingkronkan perencanaan satuan kerja;
- f. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan;
- g. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan;
- h. Menyiapkan laporan keuangan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- j. Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, data dan Informasi

mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Teknis Daerah Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Data dan Informasi;
- b. Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan tahunan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, data dan informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk agar kuantitas penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung

lingkungan;

- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk melalui penetapan perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk;
- e. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang penyuluhan, advokasi dan pergerakan;
- f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan petugas keluarga berencana (PKB) / penyuluhan lapangan keluarga berencana (PLKB);
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitas bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, data dan informasi; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Data dan Informasi membawahi tiga seksi yaitu :

1. **Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga** mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi, pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - e. Mempersiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - f. Melaksanakan pengumpulan data keluarga yang meliputi aspek

- kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga dan lainnya;
- g. Menyusun konsep dan strategi pelaksanaan program parameter kependudukan;
 - h. Menyiapkan dan menyampaikan materi dan rancangan analisis dampak kependudukan;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Melaksanakan kegiatan Jambore Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Petugas Keluarga Berencana (PLKB) dan lini lapangan lainnya;
- e. Melakukan pengembangan materi penyuluhan bagi peningkatan dan pengembangan pendayagunaan lini lapangan;
- f. Melakukan pembinaan kepada PKB/PLKB dan IMP serta lini lapangan lainnya di Kecamatan, Nagari dan Jorong;
- g. Melaksanakan kegiatan pendataan potensi IMP, PLKB/PKB dan lini lapangan lainnya;
- h. Melakukan penilaian dan fasilitasi pemberian penghargaan kepada PLKB/PKB, IMP dan lini lapangan lainnya;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Seksi Informasi dan Data mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Menyusun dan mengumpulkan data dan informasi;
- e. Menghimpun laporan dan data dari tingkat kecamatan dan nagari;
- f. Melakukan pengolahan data laporan mulai dari input/entri data, pengolahan sampai dengan output tabel-tabel informasi;
- g. Menyebarkan data dan informasi berupa hasil evaluasi dan hasil analisa program yang disebarkan kepada komponen/instansi pengguna data;
- h. Melakukan pengendalian dan pengawasan melalui validasi data, konsistensi data dan matematika cek;
- i. Melakukan koordinasi dengan menyampaikan informasi dan data terpilih sebagai bahan pembuatan keputusan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan informasi dan data; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- d. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan ketahanan remaja, bina

- keluarga lansia dan rentan;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - g. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber-KB;
 - h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - i. elaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta kesehatan reproduksi remaja;
 - j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta kesehatan reproduksi remaja; dan
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan unstansi terkait dalam pelaksanaan tugas.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :

1. Seksi Jaminan Pelayanan ber-KB mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menghimpun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber-KB;
- e. Merencanakan penyusunan program dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kontraepsi;
- f. Melaksanakan kegiatan, pelayanan KB bagi keluarga miskin;
- g. Melaksanakan kegiatan terpadu Bulan Bakti Petugas Lini Lapangan UPT Dinas PPKB dan P3A, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana

- (PLKB), Petugas Keluarga Berencana (PKB), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari (PPKBN), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Jorong (PPKBJ), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Bhayangkara, Bulan Bakti TNI Manunggal Keluarga Berencana Kesehatan (TMKK) dan Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), KB-Kesehatan;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis kepada UPT Dinas PPKB dan P3A dan Perlindungan Anak serta PKB;
 - i. Melakukan kegiatan teknis operasional keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan partisipasi pria dengan unit pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Keluarga Berencana, Posyandu, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
 - j. Melaksanakan pengembangan program keluarga berencana di Perusahaan;
 - k. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan distribusi alat dan obat kontrasepsi;
 - l. Melakukan konseling dan pengayoman terhadap calon peserta keluarga berencana baru dan peserta keluarga berencana aktif;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Seksi Kesertaan ber-KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta

- pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber-KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pembinaan kesertaan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan bidang pembinaan kesertaan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi bidang Pembinaan kesertaan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. Mengembangkan kegiatan lainnya, metode-metode, prosedur-prosedur, pemasaran bagi produksi program pemberdayaan keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga (kelompok kegiatan bina keluarga);
 - i. Mengembangkan kemitrausahaan, sumber permodalan, dan jaringan pemasaran bagi produksi program pemberdayaan ekonomi keluarga dn pengembangan ketahanan keluarga;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. Melaksanakan monitoing, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan advokasi dan kesehatan reproduksi remaja dan hak-hak reproduksi;
- e. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pengembangan perumusan program dan pembinaan peningkatan kesehatan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi dengan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM);

- f. Menyiapkan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam perumusan program dan kegiatan peningkatan advokasi dan kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- g. Mengembangkan/melembagakan program advokasi dan kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui jalur keluarga, sekolah, masyarakat, tenaga kerja, pusat informasi dan konseling remaja dan wadah pembinaan remaja lainnya;
- h. Membina Kelompok Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KKR);
- i. Mengembangkan kegiatan lainnya, metode-metode, prosedur-prosedur, kesehatan remaja dan hak-hak reproduksi;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi dan kesehatan reproduksi remaja dan hak-hak reproduksi;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri dari :

1. Seksi Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Melaksanakan program/kegiatan yang mendorong tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan melaksanakan sosialisasi;
- e. Melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian perempuan;
- f. Melaksanakan kegiatan peningkatan akses layanan konsultasi dan pemahaman pencatatan perkawinan terhadap perempuan;
- g. Melakukan fasilitasi dan sosialisasi pengembangan diri perempuan dan berorganisasi, berserikat dan berkumpul dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan;
- h. Melakukan fasilitasi dan mengupayakan pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya daerah;
- i. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Melaksanakan program/kegiatan yang menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak;
- e. Melaksanakan program/kegiatan menjamin hak anak untuk

- menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak dan menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak;
- f. Melaksanakan program/kegiatan yang bekerjasama dengan pihak swasta, dan/atau LSM untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan hak anak;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota Layak Anak (KLA) melalui sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - h. Menyusun dan mengumpulkan data dasar pengembangan KLA dan menyusun Rencana Aksi Daerah KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja;
 - i. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
 - j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus mempunyai fungsi :

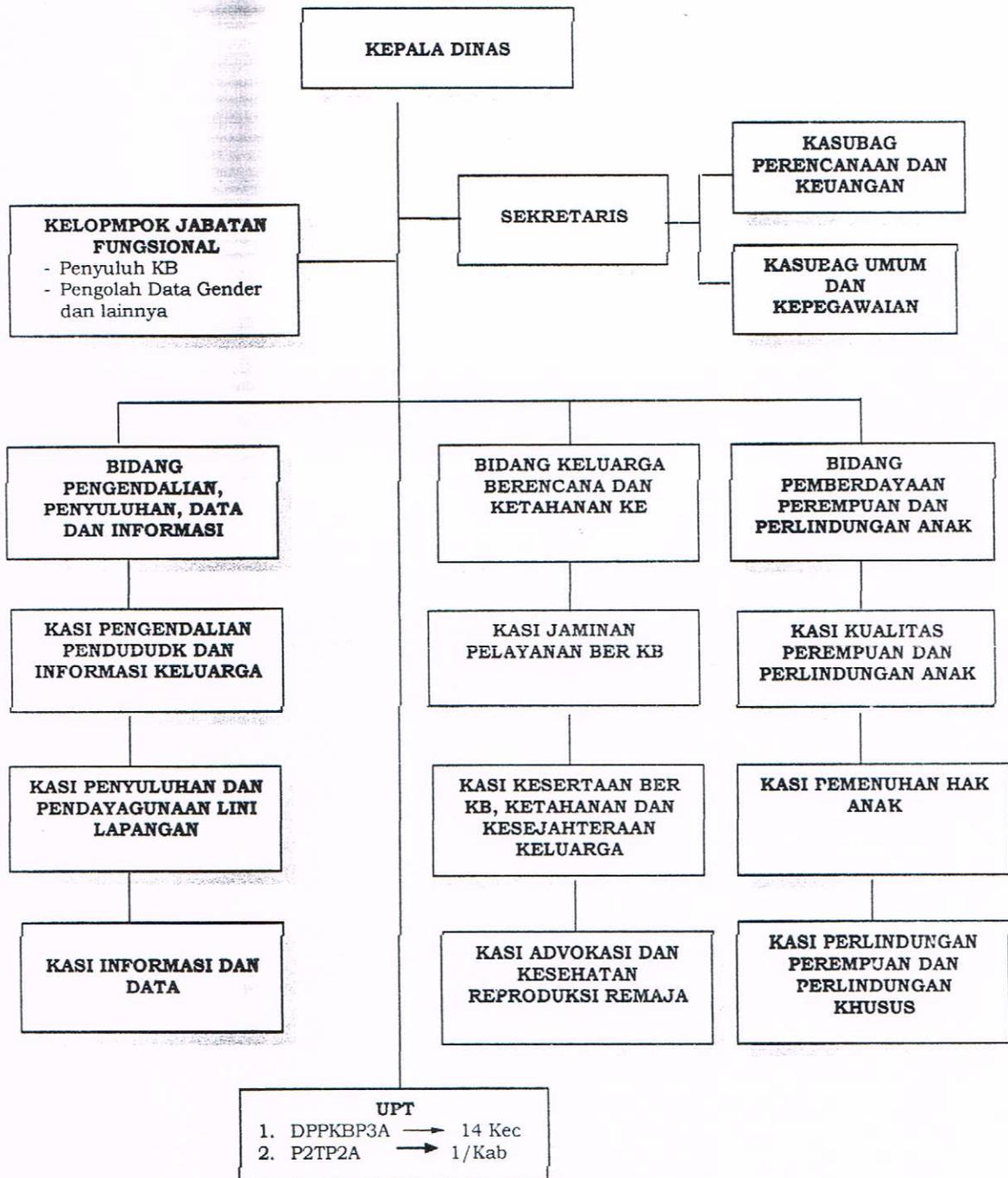
- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai hak perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga adat dan /lembaga lainnya;
- e. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada masyarakat;
- f. Menyusun database dan informasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan;

- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dengan instansi terkait melalui penanganan pengaduan korban kekerasan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan pendampingan hukum dan pemulangan dan reintegrasi sosial
- h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka perlindungan khusus anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak jadi korban NAPZA, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anak korban perlakuan salah/penelantaran dan anak penyandang cacat;
- i. Melaksanakan komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait melalui penanganan pengaduan korban kekerasan, pelayanan kesehatan, hukum dan pemulangan dan integrasi sosial;
- k. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak dengan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- l. Menkuatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak;
- m. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan hak anak;
- n. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta, dan/atau LSM dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 41 Tahun 2016
Tanggal 6 Desember 2016

Gambar 2.1

Struktur organisasi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok



2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD, maka program dan kegiatan DPPKBP3A Kabupaten Solok dilaksanakan oleh 69 orang PNS dan 12 orang Pegawai Tidak Tetap dengan total pegawai sebanyak 81 orang. Adapun susunan kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2016 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	14	12	3	5	34
2	D3	-	6	-	-	6
3	S1	19	13	2	2	36
4	S2	4	1	-	-	5
	Jumlah Total	37	32	5	7	81

Uraian analisis kondisi pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2016 dari tabel diatas terlihat bahwa hampir separuh PNS mempunyai tingkat pendidikan S1 keatas. Dengan demikian secara kemampuan dan kompetensi kondisi PNS di DPPKBP3A Kab. Solok cukup tinggi sehingga diharapkan mempunyai produktifitas yang tinggi pula.

Uraian jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas PPKB dan P3A Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas PPKB dan P3A Tahun 2016 (tahun terakhir)**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	2	5
2	Golongan III	30	28	58
3	Golongan IV	5	1	6

Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai ini adalah dengan melakukan rekrutmen pegawai yang berkualitas dan melakukan pelatihan jangka panjang dan pendek untuk meningkatkan kapasitasnya.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok untuk melaksanakan tupoksinya antara lain gedung, peralatan dan mesin, kendaraan dinas dan inventaris kantor. Gambaran mengenai jumlah, jenis dan kualitas aset yang dikelola dalam memberikan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas PPKB dan P3A Tahun 2016 (tahun terakhir)**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Mobil Operasional	V		3 Unit
2	Mobil Pelayanan	V		1 Unit
3	Mobil Penerangan	V		2 Unit
4	Mobil Antar Jemput Akseptor	V		1 Unit

5	Mobil Box Alkon	V	1 Unit
6	Sepeda Motor	V	57 Unit
7	Lemari	V	1 Buah
8	Mesin Tik	V	1 Buah
9	Papan Nama	V	1 Buah
10	Meja Rapat	V	2 Buah
11	Kursi Tamu	V	1 Buah
12	Kursi Putar	V	8 Buah
13	Tenda	V	1 Buah
14	Meja Biro	V	1 Buah
15	Kursi Plastik	V	1 Buah
16	Kipas Angin	V	3 Buah
17	Handy Cam	V	1 Buah
18	Komputer PC	V	14 Buah
19	Laptop	V	9 Buah
20	Note Book	V	22 Buah
21	Printer	V	6 Buah
22	Modem	V	1 Buah
23	Meja Kerja	V	2 Buah
24	Kursi Pejabat	V	1 Buah
25	Lemari Pejabat	V	1 Buah
26	Microphone/Wireless	V	14 Buah
27	Slide Proyektor	V	13 Buah
28	Lensa Kamera	V	2 Buah
29	Pesawat Telepon	V	1 Buah
30	Audio Monitor	V	3 Buah
31	Tablet Machine	V	39 Unit
32	Ac Calibration Set	V	1 Buah
33	Bangunan Gudang	V	1 Unit
34	Bangunan tempat Kerja Lain-lain	V	15 Unit
35	Rumah Dinas	V	1 Unit

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum memadai untuk menunjang kinerja dinas.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok telah mencukupi untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan DPPKBP3A. Akan tetapi salah satu kebutuhan yang mendesak saat ini adalah pembangunan gedung kantor baru karena kantor yang dipakai saat ini belum memadai jika dibandingkan antara jumlah pegawai yang ada dengan ketersediaan ruangan demikian juga ruangan untuk menyimpan asset-asset yang ada agar terjamin keamanannya.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PPKB dan P3A

Untuk melihat kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DPPKBP3A Tahun 2015.

- **Jumlah Akseptor KB Baru**

Realisasi pencapaian jumlah akseptor KB Baru tahun 2015 sedikit dibawah target yang ditetapkan yaitu 5.744 akseptor KB baru dari target 7.000 orang atau sebesar 82,06%. Tidak terealisasinya keseluruhan target Peserta Baru ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Dengan adanya transisi pembiayaan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi dari semula yang ditanggung dari anggaran APBN ke mekanisme pembayaran baru melalui BPJS, menimbulkan kebingungan baik dari masyarakat yang akan dilayani maupun dari petugas pelayanan (tenaga medis) sendiri. Belum optimalnya sosialisasi tentang BPJS menyebabkan sebagian masyarakat menganggap bahwa mereka yang membutuhkan pelayanan KB ini harus membayar baik untuk alkon maupun jasa medis, sehingga mereka mengurungkan niat untuk memakai alat kontrasepsi. Hal ini banyak terjadi terutama pada lokasi-lokasi yang cukup

- jauh dari jangkauan klinik-klinik KB Pemerintah sehingga sosialisasi terhadap mereka kurang sekali.
2. Disamping itu rendahnya ratio antara cakupan wilayah pelayanan dengan jumlah petugas yang ada juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian target. Kurangnya petugas yang ada (PKB dan PLKB) berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang program Keluarga Berencana kepada masyarakat. Demikian juga area pelayanan yang terlalu luas menyebabkan ada wilayah-wilayah yang kemungkinan tidak terjangkau, sehingga masyarakat yang terjaring sebagai peserta KB juga berkurang.
 3. Adanya Peserta KB baru yang dilayani oleh RSUD Kota Solok. Sebagian Pasangan Usia Subur Kabupaten Solok ternyata memilih untuk memasang alat kontrasepsi KB di RSUD Kota Solok. Hal ini tidak dapat dihindari karena masyarakat bebas untuk memilih tempat pelayanan pemasangan alkon KB yang disukainya, terutama masyarakat yang berdomisili di wilayah-wilayah yang dekat dengan RSUD tersebut. Berdasarkan catatan yang kami dapat dari RSUD tersebut untuk tahun 2015 ini saja ada sebanyak 210 peserta KB baru dari Kabupaten Solok yang dilayani. Dengan demikian mereka tidak bisa kita catat sebagai Peserta KB baru Kabupaten Solok.

Jika dilihat realisasi target Renstra DPPKBP3A sampai dengan tahun 2015 ini, yang juga tahun awal dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok 2011 – 2015, total Peserta Baru yang dijaring dalam kurun tahun 2015 adalah 34.018 orang atau 97,17% dari target Renstra. DPPKBP3A telah berupaya agar target Renstra sebanyak 35.000 orang Peserta KB Baru bisa dicapai. Namun realisasinya sedikit dibawah target Renstra DPPKBP3A. Beberapa alasan kenapa target ini tidak mencapai 100% telah dikemukakan di atas.

Selanjutnya, upaya/ langkah yang perlu dilakukan kedepan antara lain dengan meningkatkan frekuensi pelayanan pemasangan alkon kepada masyarakat dengan prioritas utama masyarakat miskin, mengefektifkan perananan Kader PKB di lapangan untuk menjaring peserta KB Baru, koordinasi yang semakin erat dengan instansi terkait terutama Dinas Kesehatan dan

Puskesmas-Puskesmas di Kecamatan, menjamin ketersediaan stock alkon dan obat-obatan lainnya di gudang Alkon dan lain-lain.

Disamping semua yang disampaikan di atas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan penting ber KB untuk mengatur jumlah anak atau jarak ideal melahirkan. Walaupun saat ini dengan perkembangan teknologi informasi sangat mudah untuk mengakses informasi tentang KB, tetapi di beberapa daerah di Kabupaten Solok terutama di nagari-nagari tertinggal dan sangat tertinggal, masih perlu di giatkan sosialisasi tentang KB, baik melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat maupun dengan upaya pendekatan kepada aparat pemerintah nagari dan Tokoh Masyarakat sekitar yang berpengaruh untuk mendorong dan memotivasi warganya agar mau ikut program KB.

- **Cakupan Peserta KB Aktif**

Cakupan Peserta KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate) Adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alkon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini menunjukkan jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai alkon terus-menerus hingga saat ini untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan.

Angka Prevalensi Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur juga dapat dipertahankan pada kisaran 70%, dimana capaian pada tahun 2015 ini adalah 70,50%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pemakaian alat kontrasepsi modern pada PUS di Kabupaten Solok telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara rata-rata pada kurun waktu 2011 – 2015, cakupan Peserta KB Aktif ini berada pada angka 72,65%. Jika dibandingkan dengan Cakupan Peserta KB Aktif BKBPP untuk periode RPJMD Kabupaten Solok 2011 – 2015 yang ditargetkan pada angka 70%, dapat terealisasi sepenuhnya dengan nilai 103,78%.

- **Cakupan Persediaan Alat Kontrasepsi Per peserta**

Sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di Kabupaten Solok hanya bersumber dari Pemerintah Pusat (BKKBN) dan pihak swasta. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok tidak menganggarkan penyediaan alat dan obat kontrasepsi dalam APBD karena kebutuhan yang ada masih dicukupi melalui penyediaan alkon oleh Pemerintah Pusat (BKKBN). Jika ada kekurangan stok alkon maka diajukan proposal permintaan penambahan alkon ke BKKBN Pusat (c.q Perwakilan BKKBN propinsi Sumatera Barat).

- **Dokumen Data Keluarga Berencana (Pendataan Keluarga)**

Dengan telah dilaksanakannya pengumpulan dan pelaporan hasil Pendataan Keluarga tahun 2016 ini, maka penyediaan informasi data Mikro untuk setiap Desa/Kelurahan/Nagari telah tersedia. Dengan demikian capaian untuk indikator ini adalah 100%.

- **Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Pos Daya)**

Untuk realiasi capaian kinerja Jumlah Kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga (Pos Daya) yang terbentuk pada tahun 2015 dimana dari 20 Pos Daya yang ditargetkan dapat direalisasikan hanya 7 kelompok atau sebesar 35%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan kurangnya tenaga pendamping /pembina kelompok-kelompok Bina Keluarga di lapangan, termasuk tenaga pendamping untuk kelompok Pos Daya itu sendiri.

Walaupun demikian sampai dengan tahun 2015 ini total Pos Daya yang telah terbentuk baik Tingkat Nagari maupun Kecamatan adalah 237 Pos Daya atau telah mencapai 87,78% dari target Renstra. BKBPP telah memprakarsai pembentukan dan pengembangan Posdaya dengan melibatkan berbagai organisasi masyarakat seperti PKK, organisasi sosial dan keagamaan seperti Pengurus Masjid, lembaga lain atau perorangan. Posdaya ini dikembangkan oleh Pemda dan seluruh aparatnya ditingkat kecamatan, Nagari, bahkan sampai ke tingkat Jorong.

- **Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A**

Hadirnya Undang-undang PKDRT dan Undang-undang Perlindungan anak di tengah-tengah masyarakat akan memberikan landasan hukum untuk penghapusan dan pencegahan tindak kekerasan di samping perlindungan bagi korban serta penindakan terhadap pelaku dengan upaya tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak didefinisikan sebagai berikut : "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Perempuan dan anak korban kekerasan adalah yang mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual yang melapor pada lembaga layanan di daerah (Kabupaten /Kota / Propinsi). Pada tahun 2015 ini tercatat ada 10 kasus pengaduan KDRT yang ditangani oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan BKBPP Kabupaten Solok, yaitu 5 (lima) kasus kekerasan terhadap anak dan 5 (lima) kasus kekerasan terhadap perempuan. Keseluruhan kasus ini (100%), dapat ditangani bekerjasama dengan aparat yang berwenang dan keterlibatan aktif dari pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2).

- **Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapat layanan bantuan hukum**

Sepanjang tahun 2015 seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilayani. Meskipun pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan ini sebagian besar dapat ditangani, tetap perlu langkah-langkah yang lebih pro aktif, karena kasus-kasus yang muncul ini bisa jadi hanya sebagian kecil dari kejadian-kejadian KDRT di tengah masyarakat yang tidak dilaporkan oleh korban

KDRT karena berbagai alasan. Kasus-kasus yang tidak tertangani disebabkan karena sebagian perempuan tidak melaporkan tindak kekerasan yang diterimanya disebabkan adanya rasa takut, antara lain : takut tidak mendapat nafkah, takut mendapatkan aib/malu atau takut akan mendapatkan kekerasan lagi. Keadaan demikian membuat sebagian perempuan lebih memilih berdiam diri terhadap perlakuan yang diterimanya. Diharapkan pada tahun tahun mendatang semua kasus tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terakomodir dan tertangani.

- **Ratio KDRT**

Kejadian kekerasan dalam rumah tangga sepanjang waktu pelaksanaan Renstra dapat ditekan/diminimalisir. Sebagaimana diterangkan di atas, fenomena KDRT ditengah-tengah masyarakat ibarat puncak gunung es, meskipun terlihat kecil tapi kejadian yang sesungguhnya ternyata lebih besar daripada yang tampak dipermukaan. Meskipun demikian dengan advokasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus dalam hal pencegahan dan penanganan KDRT, ratio kejadian KDRT dapat ditekan sekecil mungkin.

Untuk melihat kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2015 secara ringkas sebagaimana pada tabel 2.4 dan 2.5 berikut ini :

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas secara umum dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas PPKB dan P3A untuk setiap indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu berada pada kisaran 100%, hanya pada pencapaian indikator jumlah akseptor KB Baru sebesar 82,06% dan indikator jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga (Pos Daya) hanya tercapai 35%. Penyebab rendahnya capaian pada dua indikator ini telah diterangkan pada analisis diatas.

Untuk realisasi pendanaan dan anggaran Dinas PPKB dan P3A sebagaimana tercantum pada tabel 2.5, secara umum dapat dilihat bahwasanya anggaran Dinas PPKB dan P3A setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun ada juga anggaran kegiatan yang berkurang. Realisasi anggaranpun setiap tahunnya cukup baik, dimana rata-rata realisasi anggaran berada pada kisaran 90% ke atas. Karena tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah tidak kontinunya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun. Pada tabel 2.5 tersebut jelas tergambar bahwa banyak dari kegiatan yang dilaksanakan tidak teranggarkan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya dana APBD pada Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok, oleh karena itu hanya kegiatan prioritas saja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Hal ini tentu saja berdampak pada realisasi kinerja Dinas PPKB dan P3A, dimana beberapa indikator kinerja hanya dapat tercapai targetnya apabila kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pencapaian target tersebut terlaksana setiap tahunnya.

Hal diatas tentu perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, untuk selalu memprioritaskan alokasi anggaran untuk Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok, karena isu kependudukan ini telah menjadi salah satu isu penting baik di tingkat Internasional, Nasional maupun Regional/Daerah. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada saat sekarang ini harus jadi salah satu program pembangunan daerah yang diprioritaskan, mengingat semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin bertambah akibat tidak terkendalinya laju pertumbuhan penduduk akan menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai sektor pembangunan lainnya dan menjadi berat bagi Pemerintah Daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok

OPD Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok mempunyai dua urusan wajib yang dilaksanakan yaitu urusan wajib Keluarga Berencana dan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan.

Dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan pengembangan pelayanan ada beberapa faktor-faktor mempengaruhi yaitu :

2.4.1. Tantangan Pelayanan OPD yang mempengaruhi pelayanan adalah :

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas PPKB dan P3A pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Kesenjangan Kompetensi SDM aparatur Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok yang disebabkan adanya kebijakan *zero growth* terhadap pengadaan pegawai baru selama kurang lebih 15 tahun (1996 – sekarang). Selanjutnya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menyebabkan tidak fokusnya kelembagaan yang menangani Program KB Nasional di tingkat Kabupaten.
- b. Belum optimalnya sinergi kebijakan dalam Pembangunan Kependudukan dan KB mulai dari Pusat sampai dengan Daerah. UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyikapi melalui Peraturan Daerah Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- c. Dukungan sarana, prasarana dan anggaran Program KB di Kabupaten yang kurang memadai. Dengan demikian Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus mempunyai kemampuan dalam mengadvokasi para pemangku kepentingan agar pembangunan kependudukan dan KB menjadi program prioritas di daerah.
- d. Masih rendahnya kapasitas Institusi KB di tingkat lapangan, untuk itu perlu dilakukan pembinaan Institusi KB yang berada di lini lapangan seperti Pos Pembina KB Nagari (PPKBN) dan Sub-PPKBN, mereka ini diharapkan dapat bertugas sebagai pembina peserta KB.

- e. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD Kabupaten dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait program yang responsive gender.
- g. Belum optimalnya peran dan fungsi advokasi kelembagaan pelayanan KB/Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak terutama dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, KDRT.
- h. Belum optimalnya pembentukan Kelembagaan P2TP2A di Kabupaten dan Kota, belum terbentuk Rumah Aman bagi korban kekerasan, trafficking.
- i. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- j. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- k. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- l. Minimnya dukungan pembiayaan pemerintah pusat baik APBN, maupun dana dekonsentrasi.

2.4.2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas PPKB dan P3A pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Komitmen Kepala Daerah (Bupati), DPRD untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- b. Adanya kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak lembaga-lembaga pemerhati masalah kependudukan, KB, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

- c. Telah terbentuknya Kelembagaan P2TP2A yang berfungsi sebagai wadah pengaduan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Tingkat Kecamatan.
- d. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- e. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- f. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

Tabel 2.6 Matriks SWOT

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan Pimpinan DPPKBP3A komitmen bersama seluruh aparat Kuantitas aparat yang memadai Loyalitas aparat untuk mencapai terwujudnya visi dan misi OPD Kreativitas aparat dalam mengemban tanggungjawabnya Sarana dan prasarana serta lingkungan kerja yang memadai Alokasi anggaran yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> Masih kurangnya saran dan prasarana Kehilangan dan ilmu pengetahuan aparat belum variatif sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang Sistem data dan informasi belum memadai Belum optimalnya koordinasi antar SKPD DPPKBP3A dan Instansi terkait. Ketersediaan data terpilah dan informasi yang belum akurat Mekanisme dan polakerja setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien
<p>Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya P2TP2A dan lembaga anak lainnya yang mendukung program Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung Kebijakan Program DPPKBP3A Kab.Solok Adanya koordinasi lintas sektor antara dinas/instansi terkait di Kabupaten Komitmen Pemerintah yang seakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB dan Pemberdayaan Perempuan <p>Ancaman (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah anggaran belum memadai Belum tersedia data terpilah laki-laki dan perempuan Keengganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam melaporkan permasalahannya Belum adanya rumah singgah bagi korban tindak kekerasan perempuan dan anak 	<p>S + O</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi Memfaatkan kreatifitas dan loyalitas aparat untuk menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga-lembaga terkait; Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif akan mendukung program dan kegiatan <p>S + T</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan data terpilah untuk menghapus tidak tersedianya data laki-laki dan perempuan Peningkatan sosialisasi/pelatihan/KIE dan lainnya untuk penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Meningkatkan Koordinasi, integrasi pelaksanaan program Pembangunan Kependudukan, KB dan Pemberdayaan Perempuan 	<p>O + W</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparat Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan SDM pegawai dan <i>stakeholder</i>. <p>T + W</p> <ol style="list-style-type: none"> Perlu pendekatan untuk penambahan anggaran (dana) untuk pembangunan sarana dan prasarana Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program dan kegiatan Membangun sistem data dan informasi yang transparan, akuntabel dan aksesibel

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Solok

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Solok namun dalam pelaksanaan pelayanan sekaitan dengan tugas pokok dan fungsinya telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merumuskan permasalahan pembangunan keluarga berencana, pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan sebagai berikut :

A. Urusan Keluarga Berencana (KB)

1. Jumlah Penduduk Kabupaten Solok setiap tahunnya mengalami peningkatan. Faktor-faktor penyebab antara lain : masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif, masih kurangnya kesadaran dan partisipasi pria dalam ber-KB serta masih rendahnya kesadaran pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB. Hal ini diperparah oleh belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan primer yang dapat melayani KB dan kesehatan Reproduksi.
2. PUS yang ingin menunda kehamilannya sampai lebih dari dua tahun, tetapi tidak memakai kontrasepsi (*Unmet -Need*) yaitu kelompok - kelompok yang membutuhkan alat kontrasepsi tapi tidak dapat terlayani, masih tinggiyaitu sebesar 10,8%.

3. Masih kurangnya perhatian stakeholder terhadap remaja sehingga tidak adanya keberpihakan anggaran untuk kesehatan reproduksi remaja sehingga menyebabkan rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja;
4. Tingginya angka kenakalan remaja (seks bebas, HIV/AIDS dan NAPZA), sedangkan wadah yang akan menampung, mengarahkan dan membimbing remaja untuk menjadi remaja yang sehat dan Tegar Remaja (PIK-Remaja) hanya ada di 32 sekolah, dan 3 karang taruna, sehingga tidak semua remaja dapat dijangkau oleh PIK Remaja yang ada.
5. Era Globalisasi telah masuk sampai ke pelosok daerah yang sangat terpencil melalui elektronik dan digital, untuk itu perlu dilakukan antisipasi baik melalui kegiatan PIK-Remaja atau promosi kesehatan remaja melalui (spanduk, pamflet, binder, kalender dll) serta menambah jumlah pendidik sebaya dan konselor sebaya di setiap PIK-Remaja.
6. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana.
7. Jumlah keluarga miskin, KK yang termasuk dalam kategori prasejahtera dan sejahtera 1 masih tinggi.
8. Masih kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan

1. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda.
2. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan gender. Demikian juga pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat rendah di semua kalangan.
3. Masih rendahnya partisipasi perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya politik dan hukum.

4. Belum optimalnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemukan masalah-masalah gender yang ada, sehingga dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan masih terjadi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.
5. Belum optimalnya Partisipasi angkatan kerja perempuan.
6. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam memberikan akses dan peluang bagi kaum perempuan untuk bekerja dan berkarir, sehingga berdampak dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan.
7. Masih rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di bidang ketenagakerjaan yaitu di legislatif, eksekutif dan kelembagaan swasta.
8. Peraturan perundang-undangan yang ada sebagian juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
9. Belum optimalnya penanganan kekerasan perempuan, anak, KDRT, serta penanganan kasus-kasus permasalahan anak. Berakibat semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta KDRT.
10. Masih rendahnya kebutuhan tumbuh kembang anak juga belum sepenuhnya pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan partisipasi anak dalam proses pembangunan.

Supaya permasalahan daerah tersebut dapat dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan SKPD dalam pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau belum mencapai target yang ditetapkan dari RPJMD sebelumnya. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-

faktor internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

1. Masih Tingginya Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Solok dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun laju pertumbuhannya dapat dikendalikan sehingga semakin menurun. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok pada periode 1980-1990 menurun menjadi 1.86% dari 2.07% pada periode 1971-1980. Penurunan signifikan terjadi pada periode 1990-2000 menjadi 0.39%, namun naik menjadi 0.83% pada rentang tahun 2000-2010. Pergerakan LPP Kabupaten Solok memiliki pola yang sama dengan pergerakan LPP Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Solok hampir selalu lebih rendah daripada Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia kecuali pada periode 1980-1990 Provinsi Sumatera Barat mempunyai LPP yang lebih rendah. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia

	LPP per Tahun (%)			
	1971-1980	1980-1990	1990-2000	2000-2010
Kab.Solok	2,07	1,86	0,39	0,82
Sumbar	2,21	1,62	0,61	1,34
Indonesia	2,33	1,97	1,44	1,49

Sumber data: BPS, diolah

Peningkatan jumlah penduduk ini disebabkan antara lain : masih sedikitnya jumlah Peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), keterlambatan pemakaian alat kontrasepsi pada PUS (Usia peserta KB yang relatif tua) dan usia rata-rata wanita kawin pertama menurun.

2. Masih tingginya tingkat kelahiran penduduk.

Faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat kelahiran. Berdasarkan data BPS Propinsi Sumatera Barat (2010), TFR

Kabupaten Solok adalah 3,1. Angka ini di atas TFR Sumatera Barat yang hanya 2,9. Secara umum memang terjadi Penurunan TFR antara lain karena meningkatnya penggunaan alat dan obat kontrasepsi (prevalensi) pada pasangan usia subur. Kecenderungan meningkatnya angka prevalensi merupakan hasil dari peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, serta ketersediaan alat kontrasepsi. Dengan demikian angka prevalensi peserta KB Aktif perlu terus ditingkatkan agar angka kelahiran terkendali sehingga dapat mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang. Oleh karena itu peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, dan penyediaan alat kontrasepsi menjadi sangat penting untuk menurunkan tingkat kelahiran.

3. **Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi.**

Sebagian besar masyarakat, orang tua, maupun remaja belum memahami hak-hak dan kesehatan reproduksi remaja. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah dan tidak tepat. Masyarakat dan keluarga masih enggan untuk membicarakan masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga. Para anak dan remaja lebih merasa nyaman mendiskusikannya secara terbuka dengan sesama teman. Pemahaman nilai-nilai adat, budaya, dan agama yang menganggap pembahasan kesehatan reproduksi sebagai hal yang tabu justru lebih populer. Sementara itu, pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih terbatas jangkauannya dan belum memuaskan mutunya. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah belum sepenuhnya berhasil. Semua ini mengakibatkan banyaknya remaja yang kurang memahami atau mempunyai pandangan yang tidak tepat tentang masalah kesehatan reproduksi. Pemahaman yang tidak benar tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi ini menyebabkan banyaknya remaja yang berperilaku menyimpang tanpa menyadari akibatnya terhadap kesehatan reproduksi mereka.

4. **Masih rendahnya usia kawin pertama penduduk.**

Usia kawin pertama yang rendah juga berkaitan dengan faktor sosial ekonomi penduduk, terutama pendidikan. Di samping itu sebagian kelompok

masyarakat dan keluarga belum menerima dan menghayati norma keluarga kecil sebagai landasan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

5. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB.

Kabupaten Solok telah mulai melaksanakan pembangunan yang beorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender dalam hal KB. Namun demikian, partisipasi pria dalam ber-KB masih sangat rendah yaitu sekitar 2 persen. Hal ini selain disebabkan oleh keterbatasan macam dan jenis alat kontrasepsi laki-laki, juga oleh keterbatasan pengetahuan mereka akan hak-hak dan kesehatan reproduksi serta kesetaraan dan keadilan gender. Demikian pula, penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi masih belum mantap dalam memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan gender.

6. Masih kurang maksimalnya akses dan kualitas pelayanan KB terutama pada wilayah-wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan

Saat ini belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi terutama pada daerah-daerah yang tertinggal dan terpencil. Sesuai dengan kesepakatan internasional, ICPD (*International Conference on Population and Development*) 1994, pada tahun 2015, semua pelayanan kesehatan primer harus dapat melayani KB. Di samping itu, masih banyak pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi yang kurang efektif dan efisien untuk jangka panjang.

7. Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga.

Kondisi lemahnya ekonomi keluarga mempengaruhi daya beli termasuk kemampuan membeli alat dan obat kontrasepsi. Keluarga miskin pada umumnya mempunyai anggota keluarga cukup banyak. Kemiskinan menjadikan mereka relatif tidak memiliki akses dan bersifat pasif dalam berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas diri dan keluarganya. Pada gilirannya, kemiskinan akan semakin memperburuk keadaan sosial ekonomi keluarga miskin tersebut. Demikian pula, tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembinaan ketahanan keluarga, terutama pembinaan tumbuh-kembang anak, masih lemah. Hal di atas akan menghambat pembentukan keluarga kecil yang berkualitas.

8. **Masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan KB.**

Salah satu isu penting bagi kelangsungan pembangunan keluarga berencana adalah desentralisasi. Sesuai dengan Kepres Nomor. 103/2001, yang kemudian diubah menjadi Kepres Nomor. 9/2004, bahwa sebagian kewenangan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Dengan adanya peraturan tersebut, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan KB sampai saat ini adalah belum seluruh pemerintah kabupaten/kota menetapkan KB sebagai isu strategis dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan pemenuhan hak-hak reproduksi penduduk. Pemahaman bahwa pelayanan KB merupakan salah satu hak azasi manusia, yaitu hak rakyat untuk mengatur proses reproduksinya, masih rendah. Pembangunan KB juga belum dipandang sebagai suatu investasi yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi. Komitmen Kabupaten Solok dalam Program KB belum diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai, khususnya untuk mendukung operasional lini lapangan. Jumlah dan kualitas petugas lapangan menurun, karena PLKB lama dimutasi ke tempat lain, penggantian dengan CPNS baru tidak seperti yang diharapkan sehingga ratio PLKB/nagari masih jauh dari 1 PLKB per nagari.

9. **Gender dan Desentralisasi**

Transformasi politik menuju otonomi daerah memiliki potensi untuk melakukan perubahan besar di Indonesia. Desentralisasi bertujuan membawa pemerintah lebih dekat pada rakyat. Salah satu kecenderungan yang paling positif adalah meningkatnya kesadaran rakyat bahwa mereka dapat dan harus berperan serta dalam pemerintahan daerah. Namun demikian, desentralisasi juga diikuti oleh berbagai bentuk tantangan dan kesempatan bagi perempuan Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut termasuk keterwakilan perempuan dalam pembuatan keputusan yang pada umumnya masih terbatas.

10. **Suara Perempuan dalam Politik dan Pembuatan Keputusan**

Di masa Orde Baru, partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia sangat rendah. Tahun-tahun belakangan telah terlihat adanya perubahan, khususnya dalam pemilu 2004. Kuota lunak 30% telah diberikan bagi perempuan dalam perekrutan anggota partai politik. Walaupun tidak semua

partai politik memenuhi target dan tidak ada yang menempatkan perempuan lebih tinggi dari lelaki dalam daftar partai, wacana tentang perlunya meningkatkan partisipasi politik perempuan telah mencapai tingkatan yang baru. Sebagai hasilnya, terdapat sedikit kenaikan jumlah perempuan yang terpilih untuk jabatan politik. Ini baru permulaan, namun jalan panjang masih terbentang. Tantangan yang signifikan adalah terbatasnya pelatihan dan pengalaman politik dari banyak perempuan yang bersaing dalam berbagai pemilihan. Persepsi peran perempuan dalam masyarakat juga merupakan penghambat.

11. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan Terhadap Perempuan telah merusak banyak kehidupan. Terlepas dari cedera fisik langsung, korban kekerasan juga menderita cacat emosional dan psikologis yang lebih sulit untuk ditangani. Kekerasan terjadi dalam berbagai bentuk, (i) kekerasan dalam rumah tangga, (ii) kekerasan terhadap perempuan di daerah konflik dan paskakonflik, serta (iii) perdagangan manusia. Perdagangan manusia berhubungan erat dengan migrasi tidak resmi dan mempengaruhi banyak perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan sebagai tenaga kerja. Dengan alasan-alasan yang nyata, bentuk perbudakan moderen ini sangat sulit untuk didokumentasikan, namun terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa isu ini merupakan masalah yang signifikan. Dalam banyak kasus, kekerasan dianggap sebagai masalah pribadi ketimbang masalah publik. Tantangan kedua adalah sumberdaya dana dan manusia yang digunakan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan pada umumnya tidak memadai untuk memastikan bahwa para korban dapat diberikan bantuan yang mereka butuhkan dan yang menjadi hak mereka.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Visi merupakan arah

pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan. Visi Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021 yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi di atas, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Mensukseskan program wajib belajar 12 tahun
- 2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat.
- 3 Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.
- 4 Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.
- 5 Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sesuai dengan tupoksinya di Bidang Keluarga Berencana, DPPKBP3A bertanggung jawab untuk melaksanakan Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat. Program yang dijalankan adalah Pengendalian Jumlah Penduduk dengan indikator kinerja : Target kinerja lima tahunan (2021) Laju Pertumbuhan Penduduk 1,5%. Sedangkan untuk bidang Pemberdayaan Perempuan, DPPKBP3A bertanggung jawab melaksanakan Misi 5 : Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Program yang dijalankan adalah Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta anak dengan indikator kinerja : Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta KDRT.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi: 2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat.</p> <p>Misi: 5 Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik Dan Bersih</p>	<ul style="list-style-type: none"> Masih Tingginya Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk Tidak tersedianya Dokumen Data Keluarga Berencana Masih rendahnya jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
2	<p>Tujuan: 1 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat</p> <p>Tujuan: 2 Mewujudkan <i>Perlindungan</i>, Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Mengedepankan Pengarusutamaan Gender Dan Hak-hak Anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak. Masih belum meratanya <i>pemahaman dan partisipasi masyarakat</i> dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
3	<p>Sasaran: 3 Meningkatkan Pengendalian Jumlah Penduduk Sesuai Daya Tampung Dan Daya Dukung Lingkungan</p> <p>Sasaran: 2 Terpenuhinya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas serta upaya pencegahan dan promosi kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum meratanya <i>pemahaman dan partisipasi masyarakat</i> dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga (K/L)

3.3.1. Telaahan Renstra BKKBN

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk mewujudkan "Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong" dengan misi: 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum, 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, 5) Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing, 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan Misi Pembangunan tersebut di dukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia".

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka sasaran strategis BKKBN 2015 - 2019 yang tertera pada Renstra BKKBN 2015-2019 dalam upaya untuk mencapai tujuan utama, sebagai berikut:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15 - 49 Tahun)
3. Meningkatkan Pemakaian Kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka Kelahiran pada remaja usia 15 -19 Tahun (ASFR 15 – 19 Tahun)
6. Menurunnya Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 Tahun)

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong yang Mempengaruhi Pelayanan
Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Solok Ditinjau dari sasaran RPJMD**

No	Sasaran Strategis Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	<ul style="list-style-type: none"> Masih Tingginya Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tersedianya Dokumen Data Keluarga Berencana 	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesahatan reproduksi remaja 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Kesempatan dan peluang kerjasam dengan berbagai pihak lembaga-lembaga pemerhati Kependudukan, Keluarga Berencana
3	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya jumlah kelompok kegiatan Ketahanan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesahatan reproduksi remaja 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Kesempatan dan peluang kerjasam dengan berbagai pihak lembaga-lembaga pemerhati Kependudukan, Keluarga Berencana
4	Menurunnya Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk menjadi Peserta KB Aktif 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran program untuk mendukung Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Kesempatan dan peluang kerjasam dengan berbagai pihak lembaga-lembaga pemerhati Kependudukan, Keluarga Berencana
5	Menurunnya Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)	<ul style="list-style-type: none"> Kurang kesadaran dan Partisipasi Pria dalam ber KB 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan primer yang dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Kesempatan dan peluang kerjasam dengan berbagai pihak lembaga-lembaga pemerhati Kependudukan, Keluarga Berencana
6	Menurunnya Kehamilan yang tidak diinginkan dawi WUS (15-19 Tahun)	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kesadaran pasangan usia subur yang menjadi Akseptor KB Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan primer yang dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi Terbatasnya personil yang melayani penanganan pemakaian kontrasepsi 	<ul style="list-style-type: none"> Memanfaatkan kreativitas dan loyalitas aparatur untuk menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga – lembaga terkait Ketersediaan data dan informasi yang akurat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan dapat mendukung perekonomian masyarakat sekitar, dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah merintis usaha – usaha yang memberi kesempatan rakyat untuk berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberempuan di Kabupaten Solok. Tetapi dengan adanya penambahan dan perubahan wilayah admistrasi, pertumbuhan penduduk, perubahan faktor eksternal yang ada akan memberikan dampak adanya perubahan pada struktur dan pola ruang yang ada serta menuntut ketersediaan sarana dan prasarana juga faktor sumber daya manusia yang menjadi modal dasar untuk siap berkopetensi.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program SKPD, serta RENSTRA sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD). Isu-isu strategis yang mengemuka terkait dengan maksud di atas antara lain adalah :

- a. Keterkaitan kependudukan, KB dan Pemberdayaan Perempuan dengan pembangunan berkelanjutan ;Dinamika dari faktor-faktor di atas salah satu

- penentu keberhasilan pembangunan berkelanjutan
- b. Kualitas penduduk dan penyiapan generasi mendatang :Pembangunan Kependudukan, KB dan Pemberdayaan Perempuan terkait erat dengan pembangunan kualitas SDM, pembangunan SDM menjadi isu sentral dalam pembangunan nasional
 - c. Desentralisasi :Pembangunan Kependudukan, KB dan Pemberdayaan Perempuan memiliki keterkaitan yang sangat kuat antara global, Nasional dan Daerah. Komitmen Pemerintah Daerah sangat menentukan keberhasilan Pembangunan Kependudukan & Pembangunan Berkelanjutan
 - d. Hak dan kewajiban dari Pemerintah, Pemerintah Daerah serta Penduduk dalam pengelolaan Perkembangan Kependudukan :Keberhasilan pelaksanaan program tergantung dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (penduduk) dalam mentaati peraturan kebijakan yang ada
 - e. Kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, LSM & SCO :Pada era desentralisasi, pemerintah pusat, propinsi & kabupaten/kota memiliki peran masing-masing LSM maupun Civil Society Organization (CSO)memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan
 - f. Pemberdayaan keluarga :Pemberdayaan keluarga sangat berkaitan erat dengan pembangunan keluarga berkualitas dan akhirnya menentukan kualitas penduduk secara keseluruhan
 - g. Pengelolaan kelahiran, Penurunan kematian dan Pengarahan mobilitas penduduk :Ketiga isu tersebut merupakan komponen utama dalam pengelolaan perkembangan kependudukan.Ketiga issue tersebut harus diintervensi secara terpadu dengan program yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan akhirnya berdampak pada pembangunan berkelanjutan

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.5. Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi adalah cara pandang ke depan suatu organisasi akan dibawa kemana agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Berdasarkan hal tersebut penetapan visi merupakan bagian dari perencanaan strategis, dan langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah **"MENJADI LEMBAGA YANG HANDAL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS, PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG, SERTA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK"**

Pernyataan Visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai Lembaga Perencanaan yang berkualitas yang dapat ditunjukkan dengan lembaga yang handal dalam mewujudkan Keluarga Berkualitas, Penduduk Tumbuh Seimbang, serta Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Misi adalah sesuatu upaya yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam rangka mewujudkan Visi sebagaimana di atas, DPPKBP3A Kabupaten Solok menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan yaitu :

1. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak.
3. Menghapus segala bentuk kekerasan kepada perempuan dan anak.

Visi, Misi Kabupaten Solok dan Visi, Misi DPPKBP3A Kabupaten Solok

Visi Kabupaten Solok	Visi DPPKBP3A Kabupaten Solok
<p>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani dalam Nuansa Adat Basandi Syara, Syara' Basandi Kitabullah.</p>	<p>"MENJADI LEMBAGA YANG HANDAL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS, PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG, SERTA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK"</p>
Misi Kabupaten Solok	Misi DPPKBP3A Kabupaten Solok
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun. 2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat. 3. Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai. 4. Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi 'Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah". 5. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak. 3. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DPPKBP3A

Adapun rumusan tujuan dan sasaran dari misi yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terlaksananya Pengendalian Penduduk Untuk Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang

Sasaran :

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun);
2. Menurunnya Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need).

Tujuan 2 : Terwujudnya Efektifitas dan Kepedulian Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program KB

Sasaran :

1. Meningkatnya Pemakaian Alkon Untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dan Pengendalian Drop Out
2. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Program KB

Tujuan 3 :Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan, Kesenjangan Dan Keadilan Gender.

Sasaran :

1. Meningkatnya Implementasi Kesenjangan dan Keadilan Gender
2. Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Perempuan

Tujuan 4:Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran :

1. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak
2. Pengembangan KLA

4.3. Strategi Dan Kebijakan DPPKBP3A

Strategi

Dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka DPPKBP3A Kabupaten Solok memiliki beberapa strategi dalam pelaksanaan tugas harus dapat terukur kinerjanya dengan mempertimbangkan pada 4 (empat) faktor yaitu peluang, tantangan, ancaman dan kekuatan untuk pelaksanaan program di masa datang. Berdasarkan analisis atas ke empat faktor tersebut dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi DPPKBP3A Kabupaten Solok, dirumuskan Strategi yang akan mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran strategi dengan penekanan pada:

- a. **Menggerakkan Dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan :**
 - Advokasi Dan KIE
 - Penguatan Lini Lapangan
 - Penguatan Kemitraan Antar Lembaga
 - Penyediaan Data Dan Informasi
 - Peningkatan Infrastruktur TI
- b. **Meningkatkan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga**
 - Membina Keluarga Balita
 - Membina Keluarga Remaja
 - Membina Keluarga Lansia
- c. **Meningkatkan Usaha Keluarga Melalui Pemberdayaan Ekonomi Keluarga meningkatkan dukungan Sarana dan Prasarana Program**
 - Sarana Pelayanan
 - Sarana Penggerakan
 - Sarana Pendukung
- d. Meningkatkan penerapan kebijakan kualitas hidup perempuan
- e. Meningkatkan partisipasi dan peran serta gender dalam pelaksanaan pembangunan
- f. Meningkatkan kualitas penanganan perlindungan perempuan dan anak.
- g. Meningkatkan ketersediaan data terpilah dan informasi pengembangan kebijakan pemberdayaan gender dan keluarga berencana daerah.

Kebijakan

Berdasarkan Strategi DPPKBP3A Kabupaten Solok dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan perlu dijabarkan dalam kebijakan Pembangunan sebagai berikut:

- a. Penataan Pengendalian Kependudukan
 - Penyerasian Program Kependudukan
 - Penyiapan Indikator Dan Parameter Kependudukan Yang Akurat
 - Penguatan Analisis Dampak Kependudukan
 - Pemantapan Program Pendidikan Kependudukan
 - Penanggulangan Masalah-Masalah Kesehatan Reproduksi
- b. Peningkatan Akses Dan Kualitas KB-KR
 - Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan KB Jalur Pemerintah
 - Peningkatan Akses Dan Kualitas KB Jalur Swasta
 - Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan KB Di Galcitas
- c. Peningkatan Pembiayaan Program dan Prioritas Anggaran Pemerintah Daerah
 - Terciptanya Jaminan Pembiayaan Program KB Dan Pemberberdayaan perempuan
 - Terjaminnya Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi
- d. Penguatan kapasitas SDM Operasional Program KB dan PP
 - Pengelolaan SDM Yang Profesional
 - Penguatan SDM Lini Lapangan
- e. Pemenuhan hak-hak Perempuan dan anak melalui peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak, termasuk pengembangan anak usia dini.
- f. Peningkatan Kualitas Sumberdaya perempuan dan anak dibidang pembangunan terhadap pendidikan, kesehatan, informasi ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan lingkungan hidup.

Visi :MENJADI LEMBAGA YANG HANDAL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS, PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG, SERTA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

MISI 1 : Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Terlaksananya Pengendalian Penduduk Untuk Mencapai Penduduk Tumbuh seimbang	1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-19 Tahun)	1. Menggerakkan Dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana	Penataan Pengendalian Kependudukan
	2. Menurunnya Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	2. meningkatkan Usaha Keluarga Melalui Pemberdayaan Ekonomi keluarga Meningkatkan Dukungan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Program	Peningkatan Akses dan Kualitas KB-KR
2. Terwujudnya Efektifitas Dan Kepedulian masyarakat Dalam Pelaksanaan Program KB Valid Dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1. Meningkatnya Pemakaian Alkon Untuk Metode Kontrasepsi jangka Panjang dan Pengendalian Dropout Pembangunan Daerah	1. Meningkatkan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan Pembiayaan Program dan Prioriitas Anggaran Pemerintah daerah

	2. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Program KB	2. Meningkatkan Penerapan kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penguatan Kapasitas SDM Operasional Program KB dan PP
MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
3. Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan Gender	1. Meningkatnya Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender	1. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Terpilah Informasi Pengembangan Kebijakan Pemberdayaan Gender	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Perempuan dan Anak dibidang Pembangunan terhadap Pendidikan, Kesehatan,
	2. Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Perempuan	2. Meningkatkan Ketersediaan Data Dan Informasi Pengembangan Kebijakan Pemberdayaan Gender	Informasi ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan lingkungan hidup

MISI 3 : Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Kepada Perempuan Dan Anak

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
4. Terwujudnya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak	1. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	2. Meningkatkan Kualitas Penanganan Perlindungan Perempuan	Pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak melalui peningkatan Kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak, termasuk pengembangan anak usia dini
	3. Pengembangan KLA		

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Terlaksananya Pengendalian Penduduk Untuk Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15 ~ 49 tahun)	Angka kelahiran total (TFR) per WUS	Angka Rata-rata	2,74	2,72	2,7	2,68	2,66	2,63	2,6	2,6
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Menurunnya Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Cakupan Peserta KB Aktif	Persentase	70,50	72,50	75,25	77,50	78,25	82,50	85,00	85,00
	Terwujudnya Efektivitas Dan Kepeudulan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program KB	Meningkatnya Pemakaian Alkon Untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dan Pengendalian Drop Out	Persentase Mikip	Persentase	42,39	44	44	46	48,5	49	50	50
2.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Program KB	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Program KB	Persentase Kontap (MOW dan MOP)	Persentase	3,96	4,5	4,5	6	7,5	9,5	10	10
			Persentase Drop Out Peserta KB Aktif	Persentase	17,72	17,74	17,74	17,45	17,14	16,87	16,59	16,59
			Persentase Peserta KB Pria	Persentase	45	45	50	55	60	65	70	70
			Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB	Kelompok	14	14	28	42	56	70	84	84
			Jumlah Kampung KB	Unit	1	1	15	29	43	57	71	71
			Jumlah OPD Yang Menerapkan PPRG	OPD	-	23	25	8	20	25	30	30
			Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	Persentase	-	3	3	5	5	7	9	9
3.	Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Dan Keadilan Gender	Meningkatnya Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender	Jumlah Perempuan Yang Memegang Eselon II dan III	Orang	-	-	33	35	37	39	40	40
			Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Yang Diberikan Peningkatan Keterampilan	Orang	-	-	100	100	100	100	100	100
			Jumlah P2TP2A	Unit	-	15	20	20	20	-	-	75
			Jumlah Kelompok UPPKS	Kelompok	227	317	317	330	370	400	414	414
			Jumlah Lembaga Perlindungan Anak	Lembaga	1	1	1	2	2	3	3	3
			Ratio KDRT	Ratio	0,01212	0,01200	0,01175	0,01150	0,01125	0,01195	0,01195	0,01195
4.	Terwujudnya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	Jumlah SDM Terlatih Pengelola KLA	Orang	1	1	5	6	6	6	4	4
			Jumlah Kecamatan Layak Anak	Kecamatan	-	-	2	4	5	2	1	1
			Jumlah Forum Anak Daerah	Unit	-	1	24	20	20	15	9	9

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penyusunan Rencana Strategis DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 berpedoman RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam Renstra DPPKBP3A Tahun 2016-2021 terdapat 16 Program yang secara substansi menyesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
6. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV /AIDS
7. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KB dan KRR
8. Program Pelayanan Kontrasepsi
9. Program Keluarga Berencana
10. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
11. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

12. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
13. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
14. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Anak
15. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
16. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Masing-masing program di atas memiliki beberapa kegiatan pokok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Fendanaan Indikatorif
DINAS PENGENDALIAN PENDUUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Indikator-Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana SKPD			
							Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana SKPD		22	23		
							Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			Target	Rp.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Tata Laksana Lokal Yang Baik Dan Bersih	Penaatan Sistem Administrasi Dan Tata Laksana	Tertibnya Administrasi Dan Tata Laksana Kepemerintahan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% pelayanan administrasi perkantoran	-	100%	305.805.052	100%	373.046.749	100%	430.000.000	100%	473.000.000	100%	520.300.000	100%	572.330.000	100%	572.330.000	100%	2.674.481.801	DPPKBP3A	Kab. Solok
							100%	222.000.000	100%	190.700.000	100%	450.000.000	100%	495.000.000	100%	544.500.000	100%	598.950.000	100%	598.950.000	100%	2.501.150.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% bimbingan teknis aparatur yang dilaksanakan	-	100%	10.000.000	100%	13.620.000	100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	36.300.000	100%	39.930.000	100%	162.850.000	100%	162.850.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
							100%	3.490.000	100%	4.400.000	100%	9.000.000	100%	9.900.000	100%	10.890.000	100%	11.979.000	100%	49.659.000	DPPKBP3A	Kab. Solok		
		• Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS		Pelayanan KIE	Honor: Kader KB	1206 org	1206	579.700.000	1206	626.700.000	1206	689.370.000	1206	758.307.000	1206	834.137.700	1206	917.551.470	1206	4.405.756.170	1206	4.405.756.170	DPPKBP3A	Kab. Solok
							14 unit	709.200.000	14 unit	827.960.000	14 unit	858.132.000	14 unit	943.945.200	14 unit	1.038.339.720	14 unit	1.142.173.692	14 unit	5.519.750.612	DPPKBP3A	Kab. Solok		
Terlaksananya Pengendalian Penduduk Untuk Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang	Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15 - 49 tahun)	• Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Masih	Pelayanan pemusangan kontrasepsi KB	Aseptor	5744	7.000	227.235.000	7.000	253.182.500	7.000	250.000.000	7.000	275.000.000	7.000	302.500.000	7.000	332.750.000	35.000	1.640.667.500	35.000	1.640.667.500	DPPKBP3A	Kab. Solok
							1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	5 paket kegiatan
	Menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)		Pelayanan KB Medis Operasi	MOW & MOP	-	7.000	70.000.000	7.000	67.690.000	7.000	74.459.000	7.000	81.904.900	7.000	90.095.300	7.000	99.104.929	70 kel	483.254.219	70 kel	483.254.219	DPPKBP3A	Kab. Solok
							1 Kel / Kec	1 Kel / Kec	1 Kel / Kec	1 Kel / Kec	1 Kel / Kec	1 Kel / Kec	1 Kel / Kec	1 Kel / Kec	1 Kel / Kec	1 Kel / Kec	1 Kel / Kec	1 Kel / Kec	1 Kel / Kec	1 Kel / Kec	1 Kel / Kec	1 Kel / Kec	1 Kel / Kec	1 Kel / Kec

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tujuan	Saasan	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data "apakah pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Perangkat Daerah	Lokasi																																																																																																																																																																																																	
							Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt																																																																																																																																																																																													
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22	23																																																																																																																																																																																															
Mewujudkan Perlindungan, Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Perempuan dan Anak Mengembangkan Pengarusutamaan Gender dan Hak-hak Anak	● Rathy KDRT	● Cakupan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Dideteksi dan Ditangani	4	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1 paket kegiatan	-	184.000	-	54.255.000	1 paket kegiatan	222.649.680	1 paket kegiatan	244.514.648	1 paket kegiatan	269.406.113	1 paket kegiatan	296.346.724	1 paket kegiatan	354.684.450	1.381.580.165	DPPKBP3A	Kab. Solik																																																																																																																																																																																																	
																							Program Penguatan Kelenjangan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																											
																																													Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2T2)	1 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																				
																																																																				Program Penguatan Kelenjangan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																													
																																																																																											Penyusunan dan Pengolahan Data analisa Perspektif Gender	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																					
																																																																																																																			Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender	1 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																													
																																																																																																																																											Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																					
																																																																																																																																																																			Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan dibidang Politik dan Jabatan Publik	1 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
																																																																																																																																																																																											Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	1 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
																																																																																																																																																																																																																			Pembinaan Organisasi Perempuan	1 paket kegiatan	-	-	-
Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	1 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																	
																							Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	1 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																											
																																													Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	1 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																				
																																																																				Pelaksanaan Sosialisasi Yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	1 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																													
																																																																																											Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																					
																																																																																																																			Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	1 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																													
																																																																																																																																											Tombak Kecamatan Sayang Ibu dan Anak	1 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																					

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Program(Outcome) Dan Kegiatan (out Put)	Data Capaian Pada tahun Awal RPJMD	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Presentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan	57	%	57,25	57,50	57,75	58,00	58,25	58,50	58,50	
2	Ratio KDRT	0,01212	%	0,01212	0,01200	0,01175	0,01150	0,01125	0,01195	0,01195	
	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA										
1	Ratio Akseptor KB	0,09	%	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,15	
2	Cakupan Peserta KB Aktif	70,50	%	72,50	75,25	77,50	78,25	82,50	85,00	85,00	

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategi (RENSTRA) DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok 2016-2021, yang memuat penjabaran target capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan program SKPD dalam mendukung capaian Visi Kepala Daerah. RPJMD Kabupaten Solok 2016-2021 dan Renstra SKPD dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya pada program-program pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan serta kemaslahatan masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD dan RENSTRA SKPD untuk periode berikutnya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2016-2021 ini, DPPKBP3A Kabupaten Solok telah memiliki pedoman untuk mengarahkan kemana organisasi akan dibawa dan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kebijakan, program kerja, dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Rencana Strategi inilah akan dipakai sebagai acuan dasar dalam pengambilan langkah dan keputusan yang akan ditempuh organisasi secara terencana, terkoordinasi dan harmonis. Penyusunan Renstra ini telah diupayakan sebaik-baiknya, tetapi tidak tertutup kemungkinan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini, dan kami tetap mengharap masukan yang membangun serta kerjasamanya di masa yang akan datang untuk penyempurnaan RENSTRA.


Kepala DPPKBP3A
*ZULFAHMI, SH. MM
Nip. 13660325 199402 1 001